



3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## Menakar Periode Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Pasca Pilpres 2019

**Muhamad Husein Maruapey**

Univeristas Djuanda Bogor

e-mail : [Maruapey.husein@gmail.com](mailto:Maruapey.husein@gmail.com)

Abstrak

Periode Kepemimpinan Presiden sudah merupakan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 " Presdien dan Wakil Presiden Memegang Jabatan Selama 5 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali" . Masalah yang terjadi pasca Pilpres 2019 Pihak Oposisi berpandangan bahwa dugaan penyalagunaan kekuasaan Presiden sangat dimungkinkan jika Patahana diikutsertakan dalam perebutan tahta Presiden kedua kalinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti secara langsung dapat mengeksplor dan memahami gejala sosial yang terjadi dengan mewawancarai partisipan melalui pertanyaan secara umum terstruktur dan mendalam. Hasil yang didapatkan dalam penelitian "Menakar Periode Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia" dengan menggunakan Teori Kepemimpinan Joseph C Rost, bahwa Periode Kepemimpinan Presiden dapat disesuaikan atau diubah periode kepemimpinannya apabila unsur masyarakat (pengikut), Niat /kemauan politik pemimpin ( DPR/MPR), perubahan, tujuan, serta tanggung-jawab dan Anggaran yang memadai bersinergi satu dengan lain sehingga proses perubahan kebijakan periode kepemimpinan Presiden terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci** : *Kepemimpinan, Oposisi, Pemilihan Presiden, Perubahan*

### *Expressing The Period Of The Indonesian President Leadership*

*Abstract*

*The President's Leadership Period is already a provision in the Constitution of the Republic of Indonesia as contained in Article 7 "The President and Vice-President Hold positions for 5 years and thereafter they can be re-elected". Problems that occur after the 2019 Presidential Election The Opposition believes that the alleged abuse of President's power is very possible if Patahana is included in the second presidential throne. The method used is a qualitative method where the researcher can directly explore and understand the social symptoms that occur by interviewing participants through questions that are generally structured and deep. The results obtained in the study "Measuring the President's Leadership Period of the Republic of Indonesia" by using Joseph C Rost's Leadership Theory, that the President's Leadership Period can be adjusted if the elements of society (followers), political will / leadership (DPR / MPR), change, goals, and responsibility and there is an adequate budget in synergy with one another so that the process of policy change during the President's leadership period is well implemented.*

**Keywords:** *Leadership, Opposition, Presidential Election, Change*

#### **A. PENDAHULUAN**

Sejarah lembaga Kepresidenan dimulai sejak Negara diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pertama kali dalam sejarah, PPKI menetapkan Presiden dan Wakil Presiden (Ir Soekarno dan Muhamad Hatta) memimpin bangsa untuk periode 5 tahun. Kekuasaan Presiden dan Wakil Pressiden menurut ketentuan ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjalanan kekuasaan Presiden Soekarno dan Hata dikenal dengan kekuasaan Orde Lama berjalan terbata bata, karena masih ada pergolakan baik dari internal bangsa maupun Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Pergolakan demi pergolakan tersebut membuat situasi politik dan keamanan tidak kondusif dan mencapai puncaknya pada pengambil alihan kekuasaan oleh Mayor Jenderal Soeharto melalui Supersemar pada tahun 1966.

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto diawali dengan peristiwa G30S PKI, yakni suatu gerakan terorganisir yang ingin merubah dasar Negara RI dengan Idiologi Komunis.

Kebiadaban gerakan 30 September PKI, mengakibatkan gugurnya beberapa Jenderal sehingga mengundang prihatin dari semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk Sosok May-Jend Soeharto, Saat itu sebagai Pangkostrad TNI dengan tugas mengamankan Stabilitas Polkam Negara dari Gerakan PKI dengan antek-anteknya. Satu diantara alasan pengambil alihan kekuasaan negara dari Soekarno saat itu adalah stabilitas politik dan keamanan negara dalam kondisi terguncang sehingga untuk menstabilkan kondisi keamanan negara, Soeharto membutuhkan legitimasi kekuasaan melalui SUPERSEMAR. Dengan penuh hikmat, disertai genggam Surat Perintah tersebut, Soeharto meng kudeta pemerintahan syah Soekarno tanpa perlawanan bahkan tersingkir dari panggung politik dan diasingkan ke bogor hingga ajal menjemputnya, untuk selanjutnya lewat sidang istimewa MPRS 1967 ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden RI kedua Negara RI.

21 tahun Kepemimpinan Soekarno, silih berganti bentuk negara dan pemerintahan Indonesia mengalami perubahan. Stabilitas Polkam dirundung duka, Bentuk pemerintahan silih berganti. Dalam kurun waktu tersebut banyak peristiwa merongrong NKRI. Berbagai peristiwa terkadang membuat pendiri negara ini, termasuk Soekarno harus ekstra berpikir menyelamatkan bangsa dan negara dari anasir anasir bahkan mereka yang ingin merubah idiologi Pancasila dengan idiologi lain. Pada fase ini, walaupun dirundung peristiwa dan konflik sesama anak bangsa, namun sejarah telah membuktikan, bahwa soekarno dapat mempertahankan idiologi Pancasila dari berbagai idiologi lain yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Era selanjutnya adalah Soeharto dengan wajah baru yang dikenal dengan Orde Baru. Orde dimana Rakyat Indonesia menata kembali idiologi bangsa Pancasila dari anasir Komunis yang sengaja melegitimasi doktrin komunis buat seluruh anak bangsa. Soeharto bak pahlwan melakukan konsolidasi kedalam,

menata kembali pundi pundi negara yang hancur dengan memperkuat stabilitas POLKAM dalam Negeri untuk menebar kekuatan sambil membangun pondasi perekonomian bangsa dengan melakukan berbagai program pembangunan kesejahteraan rakyat dengan garda terdepan Partai GOLKAR sebagai basis politik mewujudkan kekuasaannya memimpin negara.

Kekuasaan Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal - Pasal UUD 1945 menjadikan Soeharto bertindak bah Raja dan otoriter menguasai lini perekonomian dan memperkuat basis politiknya pada semua strata kekuasaan baik pada Pemerintahan Pusat hingga pada Daerah, Sentra sentra kekuasaan seperti TNI/POLRI dan Para Penegak Hukum seperti MA dan Lembaga Peradilan lainnya menjadi sentra Cengkraman Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Media Massa, baik Cetak maupun elektronik dibuat tak berkutik. Kekuasaan DPR/MPR seakan tak berdaya menghadapi Soeharto. Periodisasi lembaga presiden, yang diatur dalam UUD 1945 hanya lembaran aturan biasa. Kekuasaan Presiden ibarat warisan bagi keluarga dan konconya. Korupsi dan Nepotisme tidak terbendung bahkan para penegak hukum tak berdaya menghadapi sang predator kekuasaan. Suara rakyat nyaris tak digubris, para pendemo ditangkap, dihilangkan tanpa jejak. Semua Radio, TV, Koran dan Media lain bah patung dan jarang merespons perilaku kekuasaan yang mirip firaun dizaman Moderen. Namun sebagian rakyat merasa kondisi perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat serta proses pembangunan berjalan dan menyentuh rakyat miskin. Wajar jika Soeharto oleh sebagian masyarakat dikenal sebagai bapak pembangunan. Walaupun diakhir jabatannya Soeharto dipaksa turun melalui tuntutan reformasi seluruh masyarakat, mahasiswa dan elit. namun sejarah telah mencatat namanya sebagai Presiden RI ke dua yang berkuasa selama kurun waktu 32 tahun.

Dari pengalaman sejarah pemeritahan dua Presiden ini, menurut peneliti masyarakat masih terbawah dengan pengaruh kekuasaan pemerintah dengan modifikasi sumber sumber perekonomian sebagai basis peningkatan kesejahteraan sengaja dibungkus

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

sebagai jargon jargon politik mempertahankan kekuasaan, bahkan rakyat dibuat bungkam seribu bahasa. Soekarno misalnya, selama masa pemerintahannya hanya sibuk dengan bagaimana menyamakan persepsi dan mempertahankan ideologi Pancasila dari berbagai gangguan dan konflik interest, sementara Soeharto lebih banyak mengkooptasi Pancasila dan UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya, rakyat dibuat tak berdaya, suara rakyat dibungkam, demokrasi mati suri. Terlihat benar di masa Soeharto, belum terlihat penataan kekuasaan secara adil dan merata bagi anak bangsa. Misalnya Pilpres sampai hari ini masih di dominasi oleh Putra bangsa yang beretnis Jawa, dengan Status beragama Islam. Mereka lupa dengan sejarah, lupa dengan komitmen para pendiri Negara, ketika memerdekakan bangsa ini, sebagaimana termuat dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut **“...Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain, diselenggarakan dengan cara sak sama’...**

Makna kalimat diatas mengandung arti *“ penyelenggaraan kekuasaan negara hingga penentuan bentuk pemerintahan negara harus dibicarakan secara bersama oleh seluruh anak bangsa tanpa memandang suku,ras, agama, budaya dan warna kulit. Semua mempunyai hak yang sama”, dan siapapun bisa dan dapat menjadi pemimpin di Negeri ini, tanpa mempedulikan, ras,suku,agama”*. Peneliti kembali menyinggung persoalan ini, agar semua elemen anak bangsa merenung apa yang telah kita perbuat guna merealisasi komitmen pendiri negara tersebut? Kebijakan Apa yang seharusnya diimplementasikan menindaklanjuti pola pikir pendiri negara agar memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga bangsa dengan latar belakang Ras,Suku,Agama yang berbeda tersebut. Peneliti beranggapan bahwa kekuasaan presiden tidak semestinya hanya warisan suku tertentu saja atau agama tertentu saja. Menurut peneliti saatnya kita semua kembali ke titah proklamasi dan merealisasikan janji pendiri bangsa 75 tahun silam.

Kepemimpinan berlanjut kepada Habibie, Gusdur, Megawati, Sby hingga akhirnya Jokowi, menjadikan segudang harapan menanti, terutama keadilan dan kesejahteraan. Akan tetapi peningkatan faksi ditengah polarisasi masyarakatpun kian

meningkat. Harga kebutuhan bahan pokok merangkak naik, pengangguran meningkat, nilai rupiah terpuruk dan beberapa persoalan hukum lainnya. Inilah yang menyebabkan narasi narasi menggantikan Presiden dengan hastek ganti Presiden gencar diopiniakan oposisi. Sebut saja saat kampanye pilpres 2019, tingginya polarisasi masyarakat dan faksi ditengah berlangsungnya pileg/pilpres sungguh membuat stabilitas polkam sangat mengawatirkan.

Gencarnya berita hoax dengan narasi narasi agama kental sekali terjadi. Doktrin para elit, kaum intelektual dan tokoh agama/ Alim ulama turut memperkeruh pilpres 2019. Kekuatiran elit dan sebagian masyarakatpun terjadi. Diduga Patahana melakukan tindakan kecurangan dengan berlindung dibalik kekuasaannya, melegitimasi kemenangannya ( sebagaimana berita Hoax yang turut meramaikan Medsos saat ajang Pilpres/pileg 2019 kemarin), bahkan prediksi hasil suara melalui hitungan cepat dari beberapa lembaga survey yang memenangkan Patahana dianggap sebagai penyesatan opini dengan tingkat kecurangan TSM.

Disinyalir Patahana menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi alat alat kekuasaan negara seperti TNI/POLRI, KPU/BAWASLU serta ASN termasuk Kepala Desa/Lurah melanggengkan kekuasaannya dalam pilpres untuk kedua kali. Tak hanya hasil penetapan KPU RI tanggal 21 Mei 2019 yang memenangkan Pasangan Jokowi/Ma’ruf tidak diakui Pasangan Prabowo/Sandi. Hasil Keputusan MK tentang sengketa hasil Pilpres ( Liputan6 com, Jakarta, 27 Juni 2019 ) yang mengikat dan final masih menyisahkan perdebatan diantara pihak yang bertikai. Alih alih tidak mengakui kemenangan Jokowi/Ma’rif, berkembang opini ditengah kader dan elit Gerindra agar kekuasaan Presiden dibatasi hanya sekali sehingga menghindari penyimpangan dan intervensi kekuasaan sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade beberapa waktu lalu. (TV ONE, Juni 2019 )

Dari apa yang disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang *“Menakar Periode Kepemimpinan Presiden RI”*

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Creswell (2008) metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sosial. Untuk memahami gejala tersebut peneliti harus mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan mendalam. Informasi yang didapatkan selanjutnya dikumpulkan, dianalisis untuk selanjutnya diinterpretasi guna mendapatkan hasil maksimal. Dari jumlah populasi yang ada, peneliti menggunakan purposive sampling kepada informan/responden yang dianggap mengetahui permasalahan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Kebijakan Pemerintahan serta perbaikan kearah terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bijak adil dan merata bagi semua pihak dan masyarakat Indonesia umumnya.

Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan bukanlah jabatan atau gelar, melainkan sebuah kelahiran dari proses panjang perubahan dalam diri seseorang. Ketika seseorang menemukan visi dan misi hidupnya, ketika terjadi kedamaian dalam diri (*inner peace*) dan membentuk bangunan karakter yang kokoh, ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati.

Garry Yukl (2005:2) menyimpulkan definisi yang mewakili tentang kepemimpinan antara lain sebagai berikut :

- a) Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (*share goal*)
- b) Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu
- c) kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi

- d) kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan rutin organisasi
- e) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktifitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan
- f) kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran
- g) para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial dan yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya.

Kepemimpinan sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktifitas - aktifitas serta hubungan-hubungan didalam sebuah kelompok atau organisasi (Yukl, 1994:2)

Ketika pada suatu hari filsuf besar Cina, Lao Tsu, ditanya oleh muridnya tentang siapakah pemimpin yang sejati, maka dia menjawab: "*As for the best leaders, the people do not notice their existence. The next best, the people honour And praise. The next, the people fear, And the next the people hate. When the best leader's work is done, The people say, 'we did it ourselves' "*

Justru seringkali seorang pemimpin sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpinya. Bahkan ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri. Pemimpin sejati adalah seorang pemberi semangat (*encourager*), *motivator*, *inspirator*, dan *maximizer*.

Konsep pemikiran seperti ini adalah sesuatu yang baru dan mungkin tidak bisa diterima oleh para pemimpin konvensional yang justru mengharapkan penghormatan dan pujian (*honor and praise*) dari mereka yang dipimpinya. Semakin dipuji bahkan dikultuskan, semakin tinggi hati dan lupa dirilah seorang pemimpin. Justru kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

yang didasarkan pada kerendahan hati (humble).

Pelajaran mengenai kerendahan hati dan kepemimpinan sejati dapat kita peroleh dari kisah hidup Nelson Mandela. Seorang pemimpin besar Afrika Selatan, yang membawa bangsanya dari negara yang rasialis, menjadi negara yang demokratis dan merdeka. Nelson Mandela menceritakan bahwa selama penderitaan 27 tahun dalam penjara pemerintah Apartheid, justru melahirkan perubahan dalam dirinya. Dia mengalami perubahan karakter dan memperoleh kedamaian dalam dirinya. Sehingga dia menjadi manusia yang rendah hati dan mau memaafkan mereka yang telah membuatnya menderita selama bertahun-tahun.

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berikut merupakan definisi dari kepemimpinan, berdasarkan para pakar antara lain :

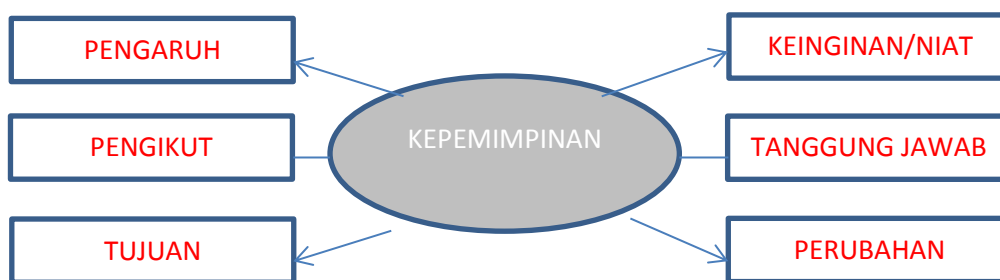
- a. Kootz & O'donnel (1984), mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh- sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.
- b. Georger R. Terry (2012), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama.

c. Slamet (2002), kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi, pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

d. Thoah (2013), kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Kepemimpinan yang disampaikan beberapa ahli diatas oleh penulis menyimpulkannya sebagai suatu proses untuk mempengaruhi orang lain untuk secara bersama sama melakukan suatu proses kegiatan dalam mencapai tujuan. Arti kepemimpinan selanjutnya disampaikan oleh Joseph C Rost,( 1993 ) Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata dalam mencerminkan tujuan secara bersama. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi diantara orang orang yang menghendaki perubahan serta memiliki tujuan bersama oleh pemimpin dan pengikutnya dan merupakan hubungan timbal balik tanpa paksaan.

Joseph C Rost menggambarkan unsur pokok kepemimpinan dalam diagram seperti dibawah ini :



Gambar 1 : Unsur Pokok Dalam Kepemimpinan

Apa yang disampaikan Joseph C Rost tersebut menjadi renungan terhadap masalah yang dihadapi, ternyata Periode Kepemimpinan Presiden jika semua elemen bangsa ini bersatu dan diikuti dengan kemauan pemimpin yang memiliki pengikut serta niat dan tanggung jawab yang kuat,

maka apapun yang dihadapi, sekuat apapun patahana dengan dukungan alat kekuasaan yang dimiliki tidak akan mampu manahan laju perubahan yang dikehendaki masyarakat.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## B. PEMBAHASAN

### Mekanisme Prosedur Perubahan Periode Kepemimpinan Presiden

Beberapa prosedur penetapan perubahan dan pergantian periode Kepemimpinan Presiden jika dicermati, selain tertuang dalam UUD 1945 juga telah tertuang dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanpa disadari bahwa teks proklamasi adalah sebuah konsep pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kepada penjajah dan dunia internasional, namun didalamnya mengatur mekanisme dan prosedur kekuasaan negara secara bersama. Implementasi prosedur penetapan Presiden diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 UUD 1945 dan UU Pilpres serta secara teknis diatur dalam UU KPU dan Peraturan Pelaksanaannya.

Untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana periode kepemimpinan presiden ini terlaksana sesuai dengan kehendak rakyat atau apakah periode kekuasaan presiden perlu dibatasi sebagaimana usulan kader dan elit Gerindra, berikut dapat dijelaskan dengan menggunakan unsur kepemimpinan J C Rost:

#### 1. Pengaruh

Pada unsur **Pengaruh** penulis mencoba menanyakan kepada beberapa informan seberapa kuat pengaruh masyarakat jika menghendaki periode kepemimpinan Presiden dibatasi dalam sekali dengan waktu memimpin berkisar 7 hingga 8 tahun?

Menurut Informan A, Jika Oposisi menghendaki perubahan periode kepemimpinan Presiden, maka harus diikuti dengan basis massa yang kuat dan serta dukungan anggaran yang memadai.

Pernyataan diatas oleh Informan B ketika dikomfirmasi mengenai unsur pengaruh terhadap periode kekuasaan Presdient, menyatakan bahwa *Sungguh naif perjuangan Oposisi untuk melakukan perubahan terhadap kekuasaan Presiden, jika tidak didukung dengan cukup Anggaran. Menurutnya Anggaran yang cukup menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan kegiatan. Bahwa untuk merubah periode kepemimpinan Presiden selain melalui jalur formal di MPR yang mempunyai tugas melakukan proses perubahan terhadap UUD 1945 tetapi juga melalui jalur non formal dengan melakukan tekanan*

*berupa aksi demonstarsi yang sudah barang tentu memerlukan anggaran dan solidaritas masyarakat.*

Dilain pihak Informan C menyatakan *Pengaruh yang dimiliki oposisi tidak dapat merubah tujuan yang dikehendaki jika pemimpin oposisi tidak dapat menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki baik anggaran maupun dukungan sumber sumber lain dalam meraih tujuannya. (Wawancara Informan, 1 Juni 2019)*

Purwadarminta, ( 1997 : 731 ) Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.

Menurut penulis bahwa dalam meraih tujuan yang dikehendaki, maka Pemimpin harus memberikan daya yang kuat kepada pengikut sehingga secara bersama sama dengan bermodal anggaran yang cukup dapat melakukan perubahan yang dikehendaki.

#### 2. Pengikut

Jumlah pengikut Oposisi yang kurang lebih 45,5 % dari Total Suara Nasional dapat dijadikan kekuatan melakukan perubahan. Sepanjang Perubahan yang diminta tidak bertentangan dengan Sendi demokrasi serta tata aturan bernegara, maka hemat penulis oposisi dapat memainkan sumber daya dan dukungan elemen masyarakat guna meraih tujuan yang dikehendaki.

Ketika ditanya mengenai seberapa besar daya dorong pengikut dalam merubah periode kepemimpinan Presdient?

Beberapa Informan yang diminta tanggapannya mengatakan antara lain sebagai berikut : *Modal dasar seorang Pemimpin adalah ketika Pemimpin tersebut memiliki basis pengikut yang besar dan kuat serta memiliki daya militansi yang tinggi. Jika dukungan pengikut sangat fantastis, maka segala keinginan akan lebih mudah tercapai, terutama ketika bersama sama menyuarakan kepada Pemerintah dan DPR/MPR untuk melakukan perubahan terhadap mekanisme dan prosedur penetapan Presiden dan Wakil Presiden untuk satu periode ( Wawancara, tgl 18-20 Juni 2019 )*

#### 3. Niat/Keinginan

Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Imam Nawawi mengatakan bahwa Niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

untuk mengerjakannya (Risalah Islam,Com : 2015)

Ketika ditanya mengenai usulan serta Niat beberapa elit pihak oposisi yang keinginan membatasi kekuasaan Presiden satu periode? Jawaban informan sebagai berikut :

*“ Bahwa keinginan untuk merubah periode kepemimpinan Presiden syah syah saja, akan tetapi hasil perolehan suara Pileg dan Pilpres April 2019 kemarin menunjukkan bahwa Patahana berpeluang meraih kursi parlemen sekitar 60 % suara. Dengan peroleh suara seperti ini maka peluang merubah perodesasi kekuasaan Presiden menjadi satu periode bah membuang garam dilaut, alias sia sia.*

Diketahui bahwa kekuasaan merubah,mengganti UUD 1945 merupakan kewenangan MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 yakni Untuk mengubah UUD maka diperlukan kehadiran 2/3 anggota harus hadir dengan suatu keputusan yang harus dihadiri 2/3 Anggota MPR (Wawancara, Infoman Tgl 2 Juni 2019)

#### 4. Perubahan

Setiap perkembangan zaman tentunya perubahan juga akan terus terjadi, perubahan memiliki efek positif dan negatif. Perubahan yang positif adalah perubahan yang terjadi kearah kemajuan suatu keadaan namun perubahan yang negative adalah perubahan kearah suatu yang merugikan. Menurut Imam Santoso (2011) Perubahan merupakan sifat dasar dari masyarakat, ini mengubah metafor “kehidupan sosial” seperti kehidupan sosial itu sendiri. Kehidupan sosial meliputi perubahan yang tiada henti . Gagasan paling umum dari perubahan mengindikasikan beberapa peralihan dalam hal entitas tertentu yang terjadi dalam waktu tertentu.

Beberapa informan yang ditemui mengatakan, bahwa agar tidak lagi menjadi polemik dikemudian hari dan saling curiga mencurigai terutama saat pelaksanaan Pilpres berlangsung, maka perlu upaya masyarakat melakukan perubahan kebijakan, selain adanya poltical will DPR/MPR dan Pemerintah sangat diharapkan menuju perubahan sistem yang hakiki.(Wawancara Informan,3 Juni 2019)

#### 5. Tanggung Jawab

Secara umum tanggung jawab adalah kesadaran individu akan perbuatan tingkah laku yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia ) adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Beberapa Informan ketika ditanya mengenai seberapa besar tanggung-jawab masyarakat,pemimpin dan pemerintah yang diemban untuk mewujudkan keinginan merubah sebuah kebijakan termasuk periode kepemimpinan Presiden?

Masyarakat,Pemimpin,para elit dan seluruh elemen bangsa termasuk DPR/MPR harus bersinergi dan konsisten dengan tanggung jawabnya sebagai unsur perubahan dan kepada profesi yang diemban, sehingga apa yang dikehendaki masyarakat dapat diwujudkan demi kelancaran sistem demokrasi dan tata pemerintahan kita. Perwujudan perubahan yang dikehendaki tentunya berkaitan dengan apa yang terkait dengan periode kepemimpinan Presiden, diantaranya perlu ada kejelasan di Pasal 6 UUD 1945. Jika diperlukan maka harus menambah Pasal atau merevisi pasal yang sudah ada. Selain itu diikuti juga dengan perubahan pada pasal yang berkaitan dengan ketentuan presiden dan wakil presiden UU Pilpres serta UU KPU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (Wawancara, Tgl 4-15 Juni 2019)

Selain variabel yang disampaikan Joseph, penulis berkesimpulan bahwa dukungan Anggaran terhadap Proglegnas sangat berpengaruh pada tahapan kebijakan yang diinginkan dalam upaya perubahan sistem dan mekanisme prosedur penetapan periode kepemimpinan Presiden termasuk politik will pemerintah dan dukungan masyarakat sehingga terlaksana dengan baik.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

#### Kesimpulan

Periode Kepemimpinan Presden beberapa waktu lalu menjadi polemik ditengah polarisasi masyarakat pasca Pilpres 2019. Beberapa elit Lokal maupun Nasional termasuk Andre Rosade, Wakil Sekjen Gerindra mengungkapkan bahwa Periode

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Kepemimpinan Presiden perlu diubah seiring dugaan tingginya intervensi Patahana terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres beberapa waktu lalu serta tidak objektif penyelenggara negara baik itu Polri/TNI, KPU/Bawaslu bahkan PNS serta Kades dan Lurah. Akselerasi patahana melalui kekuasaan yang dimiliki ketika Pilpres dilaksanakan, patut menjadi perhatian, walaupun fakta menunjukkan tidak adanya bukti yang mengarah pada pelanggaran dan penyelewengan kekuasaan, dan agar pelaksanaan pilpres berjalan dengan baik maka KPU sebaiknya mengeluarkan Surat perintah Cuti kepada Patahana demi menjaga marwa pelaksanaan pilpres berjalan aman, tertib dan lancar.

### Rekomendasi

Agar proses perubahan terhadap periode Kepemimpinan Presiden dapat terlaksana dengan baik, hemat penulis, jika perubahan yang dikehendaki didukung unsur-unsur seperti adanya Pengikut yang Fanatik, Pengaruh Kepemimpinan Yang Cukup Tinggi, Niat masyarakat melakukan perubahan kebijakan, serta adanya kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif DPR/MPR menjadi modal utama terlaksananya perubahan suatu kebijakan, termasuk jika seluruh rakyat menhendaki satu periode jabatan kepemimpinan Presiden.

### REFERENSI

Baskara T Wardaya, 2007, *Membongkar Supersemar*, JB Publisher, Jakarta

Gary Yukl, 2005, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Index, Jakarta

George R Terry, 2012, *Asas - Asas Manajemen*, PT Alumni, Bandung

Joseph c Rost, 1993, *Leadership For The Twenty-First Century*, Fraeger Publisher, USA

JR Raco Me, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta

Koonts & O Donnel, 200, *Principle Of manegment And analisis of Menegment Function*, Mc, Graw Hill, Booy Coy

Oren Harari, 2005, *The Leadership Secrets of Colin Powell*, Sebuah Paradigma Baru Kepemimpinan, Gramedia, Jakarta

Safrudin Bahar, 1993, *Risalah Sidang BPUPKI & PPKI*, Cet IV, Sek-Neg, Jakarta

Slamet, M, 2002, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta

Soekarso & Iskardar Putang, 2015, *Kepemimpinan, Kajian Teoritis & Praktis*,

Soetarjo Wijono, 2018, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*, Kencana Publisher

Thoha, Miftah, 2013, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Rajagrafindo, Jakarta

Undang A Kamaludin, 2018, *Dinamika Politik di Indonesia, Politik Sejak Orde Lama hingga Reformasi*, Pustaka Setia, Jakarta

Yuhanes Arianto BN, 2018, *Kepemimpinan Untuk Mahasiswa*, Teori dan Aplikasi, Uki, Jakarta

Tim Visi Yustita, 2014, *UUD Negara Republik Indonesia*, Jakarta